

Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Nurmila^{1*}, Petronela Sahetapy², Iriane. S. Ponto³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia
Email: nurmilamandarita@gmail.com ^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program badan usaha milik desa di Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis menggunakan model analisi interaktif dan Miles dan Huberman yaitu mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat meskipun banyak hambatan yang ditemui. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang diukur, yakni : a) secara konteks pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes begitupun dalam mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BUMDes yang tidak baik, b) Secara input atau masukan diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat, c) Secara Proses menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung bahkan mengalami kerugian sehingga bias dikatakan unit usaha belum inovatif dan kreatif, d) secara evaluasi produk dari pengelola BUMDes dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam tiga bulan, dengan pertanggungjawaban usahanya di bidang Perdagangan dengan produk BumdesMart dan Budidaya Ikan.

Keywords: Bumdes, Evaluasi, Program

PENDAHULUAN

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya meningkatkan PADes atau pendapatan asli Desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa. Upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan

ekonomi yang adil dan seimbang, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari tingkat Desa sehingga Desa tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Pusat, Dengan demikian Desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi atau terobosan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ialah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Bumdes atau badan usaha milik Desa

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Badan Usaha Milik Desa / BUMDES merupakan lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemakmuran suatu Desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian Desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Pasal 87 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 menjelaskan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai

lembaga sosial dan lembaga komersial Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012:73).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli Desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektifitas. BUMDes kedepan akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan adanya Undang-Unang nomor 6 tahun 2014, masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di Desa harus di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui program BUMDes. Adapun program dari BUMDes adalah usaha jual

(BUMDes Mart) dan Budidaya Ikan, program tersebut diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai cara dan program agar tercapainya tujuan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang sesuai dengan perkiraan. Banyak faktor yang menghambat proses program tersebut antara lain salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar dalam hal pengelolaan BUMDES, dan kurangnya dana APBD yang diberikan pemerintah kepada Desa, akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini pemerintah Desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah Desa akan menemukan hambatan-hambatan.

Program BUMDes dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sector informal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa, dan meningkatkan pendapatan asli Desa

(PADes), sesuai dengan kondisi dan situasi social budaya daerah setempat.

Sebagaimana teori dari Boyle (dalam Suharto, 2005:38) evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan dimasa mendatang. Kemudian Suharto dalam Apriliani (2016:332) menjelaskan bahwa evaluasi dapat dilihat melalui beberapa tahapan, secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Evaluasi Tahap Perencanaan, Evaluasi Tahap Pelaksanaan, Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan.

Badan usaha milik Desa (BUMDes) Di Desa Hunuth Durian Patah memiliki usaha seperti usaha jual yang dinamakan (BUMDes Mart) dan usaha budidaya ikan, melihat kondisi BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah 4 tahun dan telah memiliki beberapa unit usaha, maka penulis tertarik melakukan pengkajian secara ilmiah mengenai BUMDes yang ada di Desa Hunuth.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan masyarakat bahwa program BumdesMart sangat bermanfaat bagi perekonomian yang ada di Desa sebagaimana tujuan pembentukannya namun tidak saja berakhir pada program yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan suatu kajian untuk mengetahui beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, apakah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu evaluasi program sangat dibutuhkan untuk mengetahui hal tersebut melalui penelitian dengan judul

“Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian Kualitatif adalah tipe penelitian yang mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam bentuk tulisan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara (*Interview*) dan Studi kepustakaan (Dokumen). Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam mengelola data adalah dengan cara menggunakan teknik analisis data hasil observasi dan wawancara. Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menyusun dengan menggunakan purposive sampling, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Sehingga mereka dapat memberikan informasi mengenai

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang Evaluasi program BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan informan yaitu pihak pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan Masyarakat Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Maka dengan itu diperlukan Evaluasi dengan indikator evaluasi Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan mencakup analisis masalah yang berkenaan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan berisi tentang kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan, suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*ideality*).

Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah

kekuatan dan kelemahan dari objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian panjang.

Badan Usaha Milik Desa pada penelitian ini berada di Desa Hunuth Durian Patah merupakan Desa yang mendirikan BUMDesa sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah terkait dengan kegiatan Pelaksanaan BUMDes adalah sebagai berikut: “Baik jadi BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah ini dari tahun 2019 sudah di resmikan, di kukuhkan oleh bapak Kepala Desa. hingga akhir ini BUMDes ini telah melaporkan beberapa unit kegiatannya termasuk Unit tempat usaha BumdesMart dan Budidaya Ikan”. (Wawancara, pada tanggal 9 Maret 2023).

Sesuai dengan uraian diatas dijelaskan bahwa BUMDes Desa Hunuth Durian Patah diresmikan pada tahun 2019 oleh Kepala Desa dan Hingga saat ini telah melaporkan unit kegiatannya yaitu Unit Usaha BUMDesaMart

dan Budidaya Ikan. Jadi BUMDes telah disahkan secara legalitas berdasarkan Peraturan Desa dan AD/ART.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan tujuannya sebagaimana pasal 3 Permendes Tahun 2015. Dimana tujuan BUMDes dibentuk dan dikelola ialah meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Hasil Wawancara terkait dengan Pengawasan Pengelolaan BUMDes terhadap Kepala Desa Hunuth Durian Patah adalah sebagai berikut: “Pengelolaan BUMDes itu setiap tiga bulan ada laporannya, laporan kegiatan yang terutama unit usaha BumdesMart yang harus diperhatikan penjualanya dan produknya, apalagi usaha budidaya ikan yang harus di awasi setiap saat”. (Hasil wawancara, pada tanggal 9 Maret 2023).

Sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pengelolaan BUMDes dilakukan laporan kegiatan setiap tiga bulannya, terutama usaha BumdesMart dan Budidaya Ikan yang harus di awasi setiap saatnya.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti bahwa dalam Pengelolaan kegiatan BUMDes tidak lagi berjalan dengan semestinya sehingga Pengelolaan BUMDes tersebut tidak Efektif dan tidak berjalan sesuai dengan harapan, begitupun Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah adalah sebagai berikut: “untuk saat ini BUMDes belum berjalan dengan secara normal atau sesuai dengan harapan, dikarenakan dalam kepengurusan saat ini berada pada tahap transisi masa kepengurusan dan akan membentuk kepengurusan baru”. ”. (Hasil wawancara, pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan dengan uraian diatas, dijelaskan bahwa, BUMDes Desa Hunuth Durian Patah tidak berjalan dengan normal dikarenakan masih dalam masa pergantian kepengurusan dan pembentukan kepengurusan baru. Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas Desa atau PADes, sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan terhadap sekretaris Desa Hunuth Durian Patah terkait dengan peran BUMDes adalah sebagai berikut: “Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes

dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui bantuan sosial yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Hasil pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dibuktikan bahwa Peranan BUMDes secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas Desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan social, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012:78-81).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah diresmikan pada tahun 2019 yang memiliki program tempat usaha BumdesMart dan Budidaya Ikan, yang saat ini tidak berjalan dengan normal disebabkan BUMDes belum memiliki kepengurusan dan

akan membentuk kepengurusan baru. BUMDes Desa Hunuth Durian Patah itu sendiri berperan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas Desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes.

Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk melaksanakan program yang telah dipilih, evaluasi input untuk mengaitkan tujuan, konteks, input dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Disamping itu, evaluasi ini dibuat untuk memperbaiki program bukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Evaluasi input dilakukan terhadap tersedianya sumber daya program dalam hal ini anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan. Singkatnya, input merupakan model yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar penggunaan sumber daya yang ada bisa mencapai tujuan serta secara esensial memberikan informasi tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah sebagai berikut: “Dalam usaha yang di lakukan

BUMDes Desa Hunuth itu untuk mengembangkan usaha BUMDesnya iyalah salah satunya itu BumdesMart yang selalu diperhatikan produknya supaya tidak kosong, agar masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh atau ketempat lain lagi untuk berbelanja karna di BumdesMart masih terbilang murah dibandingkan yang lain, walaupun masih ada masyarakat sebagian merasa produknya masih kurang lengkap, sehingga proses pengembangan usaha dari BUMDes Desa Hunuth Durian Patah tidak lancar, jadi kami selalu menghimbau pengurus BUMDes untuk berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pendamping Desa peneliti menyimpulkan bahwa dalam usaha yang dilakukan BUMDes untuk mengembangkan usaha BUMDesnya iyalah salah satunya itu BumdesMart yang selalu diperhatikan produknya supaya tidak kosong, agar masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh atau ketempat lain lagi untuk berbelanja karna di BumdesMart masih terbilang murah dibandingkan yang lain, walaupun masih ada masyarakat sebagian merasa produknya masih kurang lengkap, sehingga proses pengembangan usaha dari BUMDes Desa Hunuth Durian Patah kurang lancar, disebabkan masyarakat masih berbelanja ketempat lain jika produk yang dibutuhkan tidak ada di BumdesMart, jadi dalam kejadian ini pengurus BUMDes selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencanarencana aktivitas, dan penganggaran, jadi orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) yang sudah beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diemukakan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut: “Pengelola BUMDes harus disiplin seperti ketika produk yang ada pada BumdesMart kosong harus selalu di isi kembali agar masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh ketempat lain untuk berbelanja” (Hasil wawancara dengan MB pada tanggal 10 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu masyarakat dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes harus disiplin seperti ketika produk yang ada pada BumdesMart kosong harus selalu di isi kembali agar masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh ketempat lain untuk berbelanja, usaha yang dilakukan BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah masih memiliki hambatan seperti kurangnya perhatian terhadap masyarakat mengenai pengawasan dalam program BUMDes.

Esensi yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada hakekatnya

tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Implisit di dalamnya, manusia merupakan unsur pokok di dalam proses pembangunan, dengan demikian, selain bertujuan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, maka secara ideal pembangunan masyarakat juga mempersyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif dari masyarakat. Pembangunan akan berhasil guna ketika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan masyarakat juga harus diukur dengan ada atau tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan masyarakat.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan BUMDes Desa Hunuth Durian Patahdapat dibuktikan bahwa terlihat bentuk kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah Desa, dalam hal ini berupa pemberian anggaran Desa untuk program usaha dalam BUMDes Adapun indikator dari keberhasilan kerjasama yang telah dilakukan dengan baik itu berupa usaha jual BumdesMart yang dilakukan pada BUMDes dan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes, meskipun pelaksanaanya belum maksimal sehingga masih ada sebgian kecil masyarakat yang partisipasinya juga kurang maksimal. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar BUMDes

dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat Desa Hunuth Durian Patah.

Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan yang akan selesai. Evaluasi proses dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar operasional prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah terkait dengan usaha yang dikelola yaitu sebagai berikut: “Unit usaha yang telah dikelola dan dikembangkan yaitu ada dua unit usaha dalam hal ini di dibidang perdagangan yaitu BumdesMart dan budidaya ikan” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Hunuth Durian Patah unit usaha yang telah dikelola dan dikembangkan yaitu ada dua unit usaha dalam hal ini di dibidang perdagangan yaitu BumdesMart dan budidaya ikan.

Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai

melalui tindakan public, dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai masyarakat yang bergabung di BUMDes kurang aktif dalam melaksanakan program-program BUMDes. Dari hasil pengamatan program-program yang aktif yaitu perdagangan dan perikanan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah terkait pengelolaan usaha BUMDes yang dijalankan yaitu sebagai berikut: “Dalam pengelolaan BUMDes Desa Hunuth pertama yang kita kelola itu program budidaya ikan sejak tahun 2021 sampai saat ini, sedangkan program Bumdesmasrt itu baru berjalan atau beroperasi pada tahun 2022” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Desa Hunuth pertama yang di kelola itu program budidaya ikan sejak tahun 2021 sampai saat ini, sedangkan program Bumdesmasrt itu baru berjalan satu tahun atau beroperasi pada tahun 2022.

Dalam sehari-harinya kegiatan perekonomian masyarakat Desa Hunuth Durian Patah ada yang bertani, nelayan, dan berdagang, selain itu juga ada yang berprofesi sebagai pegawai. Dari pengamatan, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, artinya dalam sehari-harinya masyarakat membagi waktu untuk ke laut dan berdagang. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan program BUMDes yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah seperti berikut:

“dalam program BUMDes seperti usaha perdagangan BumdesMart masih memiliki pengawasan yang kurang baik, sehingga terkadang dalam BumdesMart sering terjadi kekosongan barang yang akhirnya masyarakat lebih memilih berbelanja di tempat lain yang walaupun di BumdesMart lebih murah, sedangkan dalam pengelolaan budidaya ikan pada akhir-akhir ini mengalami kerugian yang cukup besar seperti matinya semua bibit yang di akibatkan perubahan iklim cuaca dan makanan ikan yang tidak cocok sehingga hampir semua bibit mati” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023).

Hasil yang diamati oleh peneliti dalam program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hunuth Durian Patah memiliki beberapa kendala yang cukup besar seperti usaha perdagangan BumdesMart masih memiliki pengawasan yang kurang baik, sehingga terkadang dalam BumdesMart sering terjadi kekosongan barang yang akhirnya masyarakat lebih memilih berbelanja di tempat lain yang walaupun di BumdesMart lebih murah, sedangkan dalam pengelolaan budidaya ikan pada akhir-akhir ini mengalami kerugian yang cukup besar seperti matinya semua bibit yang di akibatkan perubahan iklim cuaca dan makanan ikan yang tidak cocok sehingga hampir semua bibit mati.

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat

ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Meningkatkan penghasilan BUMDes yang dijiwai oleh semangat kebersamaan dan self help dalam upaya memperkuat ekonomi kelembagaannya akan bergerak seiring dengan peningkatan sumber sumber pendapatan asli Desa dengan tergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat di bawah naungan BUMDes. Dengan adanya kebersamaan dan mekanisme self help ini akan mengurangi peran free rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi ekonomi dengan praktek rente di masyarakat (Prasetyo, 2016).

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi pengawasan maupun pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung. Potensi Desa belum dimanfaatkan secara maksimal, dan bahkan mengalami kerugian, Tidak ada keuntungan untuk kas BUMDesa maupun untuk masyarakat sehingga unit usaha belum inovatif dan kreatif.

Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Evaluasi produk bertujuan untuk identifikasi hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan, menghubungkan dengan tujuan, kebutuhan, konteks, input, dan proses informasi, dan menilai penyelesaian dengan

menentukan beberapa faktor seperti kualitas, kesesuaian, keadilan, kesetaraan, biaya, keamanan, dan signifikansi. Dan evaluasi produk ini berfungsi untuk memutuskan apakah meneruskan, memodifikasi, atau memfokuskan kembali program, dan menyajikan catatan yang jelas mengenai efek dibandingkan dengan kebutuhan, tujuan, dan biaya.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Desa). Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah terkait dengan keputusan atau kebijakan yang melibatkan

partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: “Sejauh ini saya melihat partisipasi masyarakat masih kurang kerjasamanya dengan pemerintah Desa dan pengurus BUMDes, disisi lain keikut sertaan masyarakat terhadap program perdagangan BumdesMart lebih menarik minat masyarakat karena banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan program tersebut dengan harga yang sedikit murah dibandingkan tempat lain”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini partisipasi masyarakat masih kurang kerjasamanya dengan pemerintah Desa dan pengurus BUMDes, disisi lain keikut sertaan masyarakat terhadap program perdagangan BumdesMart lebih menarik minat masyarakat karena banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan program tersebut dengan harga yang sedikit murah dibandingkan tempat lain, tetapi belum mampu memberikan efek bagi pendapatan Desa.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional memiliki peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Pendamping Desa Hunuth Durian Patah terkait dengan keputusan atau kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu: “Secara regulasi semuanya dilibatkan setiap melakukan terobosan dan sebagainya pasti bermusyawarah dengan anggotanya dan

juga BPD dan kepala Desa termasuk juga masyarakat pastinya” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pendamping Desa Hunuth Durian Patah peneliti menyimpulkan bahwa Secara regulasi semuanya dilibatkan setiap melakukan terobosan dan sebagainya pasti bermusyawarah dengan anggotanya dan juga BPD dan kepala Desa termasuk juga masyarakat pastinya, Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan jasa. Pembangunan masyarakat yang berkesinambungan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan kreatifitas inisiatif serta pasrtisipasi masyarakat.

BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh mayarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Sehingga Wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam proses kegiatan usahanya selalu melibatkan pihak masyarakat dan juga aparat Desa lainnya. Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai pengaruh BUMDes terhadap perekonomiannya yaitu sebagai berikut: “semenjak BUMDes berjalan beberapa tahun terakhir kami selalu mendapatkan tambahan bantuan social dari pendapatan BUMDes tetapi untuk sekarang BUMDes tidak lagi berjalan dengan normal” (Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 10 Maret

2023). wawancara dengan AH pada tanggal 10 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dapat disimpulkan bahwa hadirnya BUMDes masyarakat mendapatkan tambahan bantuan setiap mendapatkan bantuan social dari hasil pendapatan BUMDes walaupun untuk saat ini BUMDes tidak lagi berjalan dengan normal.

Secara umum kondisi masyarakat di Desa Hunuth Durian Patah masih tergolong menengah kebawah, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari program BUMDes sehingga dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Bersama dengan itu pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Desa Hunuth Durian Patah bahwa: “Proses kerja pengurus BUMDes sudah cukup bagus kalau secara laporan para aparat pegurus BUMDes sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya. Jadi secara umum semuanya bagus terkait kinerja” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa Hunuth bahwa Proses kerja pengurus BUMDes sudah cukup baik secara laporan para aparat pegurus BUMDes sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya, Jadi secara umum semuanya bagus terkait kinerja.

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan evaluasi produk ditunjukkan dengan komitmen untuk memberdayakan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola perekonomian ditingkat Desa dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan

khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat dari hasil BUMDes sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dari hasil sudut pandang peneliti melihat evaluasi produk dari pengelola BUMDes ke pemerintah Desa dapat dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam tiga bulan, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu penerapan dari bentuk usahanya di bidang Perdagangan dengan produk BumdesMart dan budidaya ikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Keberadaan BUMDes Desa Hunuth Durian Patah belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hunuth Durian Patah dapat disimpulkan sebagai berikut: Evaluasi secara konteks pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes begitupun dalam

mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BUMDes yang tidak baik. Secara input atau masukan diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat. Secara Proses menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung bahkan mengalami kerugian sehingga bias dikatakan unit usaha belum inovatif dan kreatif, dan evaluasi produk dari pengelola BUMDes dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam tiga bulan, dengan pertanggungjawaban usahanya di bidang Perdagangan dengan produk BumdesMart dan budidaya ikan.

Faktor pendukung dari segi komitmen pemerintah dalam pengelolaan BUMDes sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana Desa. Sedangkan factor penghambat yaitu anggaran yang dimiliki Desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun konsistensi masih sangat kecil untuk menjalankan program BUMDes dan mengembangkan usaha yang lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2009). Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. BPBP Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Kamus Besar

- Bahasa Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka.
- Guna, A. D. (2021). Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sahabat Desa Baring Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.
- Hidayah, dkk (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. JSHP Vol. 3 No. 2.
- Lestari, Dian dkk (2018). Manajemen Strategik dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sugiwaras Kecamatan Monomulyu Kabupaten Poliwali Mandar. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Desa Sigi nomor 01 tahun 2014 tentang pembentukan badan usaha milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Prabowo, T. Agung (2001). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus BUMDes Desa Pojong Kecamatan Pojong Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017). Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suyatno. (2003). Dasar-Dasar Pengkreditan. Jakarta; Gramedia.
- Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat. Bandung: Rafika Aditama.
- Subaedah (2019). Evaluasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Sigi (Studi pada Gapoktan Sigampa Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat). E-jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 159-178.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang desa.
- Wahab, Solichin Abdul. (2002). Analisis Kebijakan (Dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara). Jakarta; Bumi Aksara.
- Yusuf, Farida. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: Renika Cipta.